



MASYARAKAT SIPIL DAN TRANSISI DEMOKRASI DI TIMUR TENGAH

Humphrey Wangke*)

Abstrak

Masyarakat sipil merupakan kelompok-kelompok di dalam sebuah gerakan sosial yang tidak terikat dalam bentuk organisasi atau keanggotaan, namun lebih diikat oleh jaringan sosial dari para pendukungnya. Berbekal kemampuan itu, masyarakat sipil mampu mengendalikan kesewenang-wenangan kalangan atas di negaranya. Revolusi Arab Spring di Mesir, Tunisia, Yaman, dan Suriah adalah bukti bagaimana kekuatan masyarakat sipil dapat menjadi pendorong dalam upaya demokratisasi melawan rezim penguasa yang lalim.

Latar Belakang

Proses perubahan pemerintahan negara-negara di Timur Tengah yang dimulai sejak Desember tahun 2010 hingga saat ini masih belum memperlihatkan hasilnya. Konflik kekerasan baik secara horizontal maupun vertikal masih belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Berbagai upaya masih terus dilakukan agar proses transisi menuju negara yang lebih demokratis seperti yang dikehendaki oleh revolusi tahun 2010 yang dikenal dengan sebutan *Arab Spring* bisa terlaksana secara damai.

Arab Spring telah membawa perubahan mendasar dalam dinamika partisipasi politik di dunia Arab. Di bawah sistem otoriter di Tunisia, Mesir, Libya, Suriah, dan negara-

negara Arab lainnya, partisipasi politik formal sebagian besar terbatas pada kegiatan partai yang berafiliasi dengan rezim yang berkuasa, partisipasi masyarakat sipil terkooptasi, atau pemungutan suara dalam pemilihan tidak transparan dan sering terjadi penipuan. Partisipasi politik informal seperti melalui jaringan sosial seperti *facebook* dan *twitter*, gerakan politik bawah tanah, dan gerakan sosial, seringkali menjadi satu-satunya cara bagi warga negara untuk menantang rezim mereka.

Meskipun revolusi *Arab Spring* tidak sepenuhnya membalikkan tren ini di seluruh negara-negara Arab, tetapi fenomena ini telah membawa perubahan yang signifikan pada sejumlah perbaikan kunci yang memfasilitasi

*) Peneliti Utama Tim Hubungan Internasional pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data, dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: dhanny_2000@yahoo.com



partisipasi politik formal, terutama di Mesir dan Tunisia. Namun demikian, ada juga sejumlah tantangan penting dalam mengembangkan partisipasi politik formal di dunia Arab di era transisi demokrasi saat ini. Tuntutan perubahan yang terjadi di Suriah sejak tiga tahun lalu hingga saat ini masih belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Medan pertempuran bukan hanya terjadi di kota Homs dan Aleppo di Suriah tetapi juga di Kota Genewa di Swiss, tempat berlangsung perundingan antar-pihak yang bertikai di Suriah.

Di Mesir, setelah tiga tahun revolusi, sekurang-kurangnya ada tiga hal yang belum berubah, yaitu *pertama*, militer masih tetap berkuasa sama seperti sebelum revolusi; *kedua*, Al-Ikhwanul Al-Muslimin (IM) tetap dilarang untuk ambil bagian dalam percaturan politik. IM bahkan telah dinyatakan sebagai organisasi terlarang. *Ketiga*, Mesir tetap mempertahankan diri sebagai negara yang pluralis yang secara tegas disebut dalam konstitusi baru. Konstitusi baru Mesir telah mendapat persetujuan 98,1 persen pemilih dalam referendum yang diadakan pada tanggal 14-15 Januari 2014 ditengah-tengah konflik antara pendukung IM dan petugas keamanan..

Tunisia sejauh ini menjadi satu-satunya negara yang berhasil memasuki era demokrasi pasca-tumbangannya rezim diktator Presiden Zine al-Abidine Ben Ali melalui revolusi rakyat tahun 2011. Pada tanggal 27 Januari 2014, konstitusi baru Tunisia berhasil disahkan. Konstitusi tersebut merupakan konstitusi kedua setelah konstitusi tahun 1959. Sama seperti konstitusi tahun 1959, konstitusi baru ini tetap mempertahankan prinsip emansipasi wanita dan identitas negara sipil. Konstitusi baru ini juga menegaskan Islam sebagai agama negara. Konstitusi tahun 1959 selama ini dikenal sebagai konstitusi paling sekular di negara-negara Arab. PM Mahdi Jomaah yang ditunjuk pada tanggal 14 Desember 2013 akan segera menyiapkan pemilu legislatif dan presiden berdasarkan konstitusi yang baru tersebut.

Tujuan dari tulisan ini adalah untuk menjelaskan mengapa proses transisi demokrasi di Timur Tengah pasca-*Arab Spring* berjalan sangat lambat?

Transisi Demokrasi

Secara teoritis, transisi demokrasi dibedakan dalam dua fase, yaitu fase pembebasan dari pemerintahan yang otoriter dan pembentukan konstitusi yang demokratis.

Jika kekuasaan represif masih bertahan selama masa transisi maka proses yang pertama akan terjadi. Tetapi jika lembaga represif itu dapat dihancurkan maka proses kedua akan terjadi. Jika transisi demokrasi ingin berlangsung secara simultan, maka ada tiga persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu: 1) sejumlah besar tokoh reformis pemerintah harus dapat mencapai kesepakatan dengan kelompok moderat dari lawannya; 2) para reformis harus dapat membujuk militer agar mau bekerja sama melakukan perubahan kelembagaan; dan 3) kelompok moderat harus berisi sekutu mereka sendiri.

Setiap tahapan transisi demokrasi memiliki konsekuensi yang berbeda mengingat bentuk pemerintahan negara-negara Arab memiliki tipe yang berbeda. Michelin Ishay membedakan pemerintahan negara-negara Arab dalam 3 tipe, yaitu: 1) negara homogen; 2) negara otoriter; dan 3) monarki kaya.

Negara yang masyarakatnya homogen secara etnik dan agama seperti Mesir dan Tunisia sangat mudah dimobilisasi untuk meruntuhkan rezim pemerintahan yang rapuh karena kekurangan manusia dan modal ekonomi untuk melakukan transisi demokrasi secara damai. Namun demikian, negara-negara yang homogen biasanya lemah dari sisi demokrasi karena belum mempunyai masyarakat sipil yang tangguh.

Negara yang otoriter seperti Libya, Suriah dan Yaman lebih lambat dalam melakukan pembebasan karena memiliki masyarakat sipil yang terfragmentasi dalam bentuk sektarian atau suku yang seringkali tumpang tindih dengan pembagian ekonomi. Sebaliknya, negara-negara monarki kaya praktis tidak memiliki masyarakat sipil. Meskipun demikian, monarki keturunan Arab terbukti lebih stabil daripada rezim yang mendasarkan legitimasi mereka pada ideologi yang belum tentu kebal terhadap perubahan rezim.

Peran Masyarakat Sipil dalam Transisi Demokrasi: Kasus Tunisia

Masyarakat sipil dapat didefinisikan sebagai struktur sosial yang secara spontan terpisah dari negara. Untuk membantu mengembangkan demokrasi, masyarakat sipil mempunyai peran penting dalam memajukan partisipasi politik rakyat. Kelebihan lainnya dari masyarakat sipil adalah kemampuannya dalam membatasi dan mengontrol kekuasaan pemerintahan, serta mengekspos korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Kelompok masyarakat sipil juga mempunyai kemampuan

memberikan informasi kepada masyarakat mengenai isu-isu spesifik. Karena itu, masyarakat sipil dinilai istimewa karena nilai strategis yang disandangnya itu.

Masyarakat sipil hanya bisa lahir dari sebuah komunitas yang mampu berpartisipasi secara aktif dalam proses politik. Karena itu, partisipasi politik yang dihasilkannya selalu berkaitan dengan proses pembebasan. Kemunculannya tidak terlepas dari revolusi industri di negara-negara Barat. Ketika itu, industrialisasi melahirkan nilai-nilai kewirausahaan yang merangsang produktivitas masyarakat. Akibatnya, muncul kelompok yang memiliki beberapa kelebihan, antara lain kekuatan dan kemandirian ekonomi, profesionalisme, dan intelektualitas.

Keberhasilan Tunisia dalam proses transisi demokrasi tidak terlepas dari peran masyarakat sipil didalamnya. Meskipun Tunisia tidak memiliki masyarakat sipil dalam jumlah yang besar sebagaimana di negara-negara yang sudah maju tingkat demokrasinya, akan tetapi kemajuan perekonomian negara itu telah membantu mempercepat proses pembentukan kelompok masyarakat sipil melalui komunikasi elektronik. Mereka bukan hanya berperan penting dalam masa transisi, tetapi juga telah memimpin dan bekerja sama dengan pihak eksternal melawan kediktatoran.

Masyarakat sipil Tunisia telah berpartisipasi dalam sebuah proses yang secara berkelanjutan menekankan pentingnya kemerdekaan, demokrasi, kebebasan, kesetaraan dan keadilan sosial. Perkembangan masyarakat sipil di Tunisia tidak dimaksudkan untuk menggantikan partai politik tetapi sebaliknya dimaksudkan untuk membangun proyek-proyek politik di mana orang-orang dapat beroperasi.

Transisi demokrasi di Tunisia dinilai sangat berhasil mengingat kelompok masyarakat sipil negara ini sangat diatur, dibatasi, dan seringkali dilarang. Rezim yang berkuasa seringkali mengendalikan dan bahkan mengooptasi organisasi masyarakat sipil untuk tujuan mereka sendiri. Kendati demikian, meskipun peraturan yang dikeluarkan oleh rezim merupakan bentuk dari penindasan, akan tetapi kelompok masyarakat sipil di Tunisia memperoleh manfaat dari kohesifitas dan sikap toleran yang dimilikinya selama ini yaitu sebuah masyarakat yang bebas dari konflik etnik.

Transisi demokrasi di Tunisia dimulai sejak tahun 2011 dengan melakukan proses reformasi konstitusi. Reformasi kelembagaan dimulai dari pemilik otoritas yang lebih

tinggi, mendistribusikan kekuasaan presiden yang sangat besar ke lembaga-lembaga pemerintahan, dan memilih anggota parlemen yang baru. Pemerintah sementara Tunisia juga membentuk komite khusus yang ditugasi menangani masalah-masalah terkait dengan konstitusi seperti keamanan dan korupsi serta kebenaran dan rekonsiliasi. Sebuah komisi pemilihan umum dibentuk dengan melibatkan tokoh oposisi Kemal Jendoubi sebagai ketuanya, dan ditugasi menetapkan parameter bagi Majelis Konstituante Nasional untuk kelancaran pemilu.

Semangat solidaritas di kalangan kelas menengah Tunisia meskipun dalam jumlah yang sangat terbatas telah menandai dimulainya sejarah baru di Timur Tengah sebagai agen perubahan dan menjadi titik awal dimulainya kebebasan berserikat dan reformasi kelembagaan untuk kegiatan masyarakat sipil. Munculnya masyarakat sipil dan pemberdayaan masyarakat sering disebut sebagai salah satu pendorong demokratisasi. Tunisia menjadi negara pertama dari negara-negara *Arab Spring* yang merasakan pentingnya peran organisasi masyarakat sipil dalam hubungan negara-masyarakat dan lembaga dan pengaruhnya terhadap berbagai aktivis sipil.

Apa yang Dapat Dilakukan Indonesia

Pasca reformasi tahun 1998, Indonesia telah berubah menjadi negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara. Salah satu keberhasilan memajukan demokrasi adalah pemberdayaan masyarakat sipil. Dalam menghadapi masa transisi negara-negara Timur Tengah pasca revolusi *Arab Spring*, Indonesia dapat berperan sebagai fasilitator perdamaian. Pengalaman Indonesia dalam menyelesaikan konflik di Kamboja tahun 1997-1998, operasi penjaga perdamaian di Timor Leste tahun 1999, rekonsiliasi Aceh tahun 2005, topan Nargis di Myanmar tahun 2008 adalah contoh kasus mediasi dan resolusi yang berhasil diselesaikan ASEAN dimana Indonesia aktif terlibat.

DPR RI juga dapat memanfaatkan forum pertemuan Organisasi Konperensi Persatuan Negara-negara Islam (PUIC) untuk mencari solusi damai di Timur tengah. Pertemuan PUIC yang akan berlangsung di Teheran dalam bulan Februari ini dapat menjadi awal dari partisipasi aktif DPR RI dalam menjalankan diplomasi parlementer di Timur Tengah. Dalam pertemuan itu, Indonesia dapat mengusulkan

langkah-langkah perdamaian di Timur Tengah atas dasar persatuan sesama muslim. Persatuan merupakan hal yang paling mendasar bagi umat Islam dan karenanya harus menjauhi sifat ekstrim dan fanatisme kelompok agar dapat tercipta suatu pendekatan dan kerja sama diantara kelompok Muslim. Atas dasar itu, Indonesia dapat mengusulkan perlunya dialog untuk menyelesaikan perselisihan di Timur Tengah.

Rujukan

1. Alan Richards, Summer, 2005, "Democracy in the Arab Region: Getting There From Here", Middle East Policy, Vol. XII, No. 2.
2. "Arab World Has Changed, so should US", The Jakarta Post, 28 Januari 2014.
3. "Bursa Calon Presiden Mulai Memanas", Kompas, 28 Januari 2014.
4. Jason William Boose, "Democratization and Civil Society: Libya, Tunisia and the Arab Spring", International Journal of Social Science and Humanity, Vol. 2, No. 4, July 2012.
5. "Jenderal Al-Sisi Maju pada Pemilihan Presiden", Media Indonesia, 7 Februari 2014.
6. "Konstitusi Baru Disahkan", Kompas, 28 Januari 2014
7. Micheline Ishay, "The Spring of Arab Nations? Paths toward Democratic Transition", Philosophy and Social Criticism, Vol. 1, No. 11, 2013.
8. Trias Kuncahyono, "Revolusi Mesir Tiga Tahun Telah Berlalu", Kompas, 25 Januari 2014.
9. "Tunisia finally passes progressive constitution", The Jakarta Post, 28 Januari 2014.